

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Lembaga Swadaya Masyarakat

2.1.1.1 Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas mendefinisikan Lembaga Swadaya Masyarakat secara luas karena menurut Undang-Undang ini Ormas meliputi berbagai bentuk organisasi yang terdiri dari kelompok masyarakat tanpa tujuan komersial. Lalu Lembaga Swadaya Masyarakat menurut pengertiannya ialah organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, melakukan kegiatan sosial, serta mengatasi permasalahan sosial secara sukarela tanpa mencari keuntungan. UU ini mencantumkan persyaratan pendirian dan pengelolaan Ormas mencakup Lembaga Swadaya Masyarakat di dalamnya agar akuntabel, melakukan transparansi serta menaati aturan hukum yang berlaku. Hikam (1999) dalam Daeli (2012:58) memandang bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan penting pada proses penguatan demokrasi melalui fungsinya untuk *civil society* yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu pembelaan, pendampingan, serta penyadaran masyarakat.

Mengutip dari Salamon dan Anheier (1998) dalam (Riva et al., 2018:79) mengungkapkan bahwa ciri-ciri Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Formal, artinya memiliki struktural anggota organisasi, memiliki sekretariat dengan aturan aturan tertulis dan prosedural yang bersifat resmi
- b. Swasta, maksudnya ialah kelembagaan yang independen tidak terikat oleh pemerintah
- c. Non-komersial yakni tidak mencari profit atau keuntungan untuk ketua maupun pengurusnya
- d. Menjalankan organisasinya secara mandiri (*self-governing*), tidak ada pengawasan dari pihak lain
- e. Sukarela (*voluntary*) yakni kegiatan dilakukan secara ikhlas atas hati nurani untuk menolong sesama

- f. Nonreligius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama
- g. Nonpolitik, yaitu tidak terlibat dalam pencalonan di pemilu.

Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan respon atas lemahnya peran pengontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai dalam memerankan fungsinya sebagai pengawas di tengah pengaruh pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada masa perkembangan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya di bidang politik dan sosial yang mempunyai tujuan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah, menuntut kebebasan, memperjuangkan kebebasan organisasi, advokasi terhadap kekerasan dan kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan pihak tertentu. Namun dalam kehidupan demokratis saat ini Lembaga Swadaya Masyarakat lebih ke arah bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun masyarakat yang madani agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Widiyanto, 2019:23).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun. 1990, menerangkan bahwa bentuk-bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan bidang kegiatannya yaitu :

- a) Organisasi Donor: organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan bisa berupa dana ataupun fasilitas untuk kegiatan organisasi swadaya lain.
- b) Organisasi mitra Pemerintah: organisasi yang melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dalam menjalankan program-program kegiatannya.
- c) Organisasi Profesional: organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan professional tertentu seperti organisasi non pemerintah pendidikan, organisasi non pemerintah bantuan hukum, organisasi non pemerintah jurnalisme, organisasi non pemerintah pembangunan ekonomi, dan lain- lain.
- d) Organisasi Oposisi: organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini memposisikan diri untuk mengkritik dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Iskandar (2017:52) menyatakan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu bagian dari wujud masyarakat yang berdaulat dan

mengutamakan kepentingan publik. Kedua organisasi tersebut merupakan himpunan dari komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan yang mengartikulasikan suara kepentingan rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil dengan ruang lingkupnya antara keluarga dan negara, menikmati kedaulatan negara yang digerakkan oleh keikhlasan para anggota masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wadah untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kepada negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan elite-elite politik. Masyarakat sipil selalu berusaha untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.

2.1.1.1 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Craig dan Mayo (1995) dalam Hikmat (2017:68) tipe organisasi sukarelawan atau Lembaga Swadaya Masyarakat terfokus pada kemandirian dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan, koneksi pekerjaan, dan kampanye melalui pendekatan strategis untuk pembangunan melalui partisipasi masyarakat pada tingkat desa maupun nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu mengusahakan diri sebagai agen kesejahteraan dan kemandirian sehingga perlu bernegosiasi dengan pemerintahan lokal maupun nasional demi kelancaran strategi yang digunakan.

Adapun fungsi organisasi masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat menurut UU No.17 tahun 2013 Pasal 6 yaitu :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Menurut Setiawan (2006) dalam Humaidi (2009:55) terdapat beberapa faktor yang mendukung peran LSM adalah:

- a) Meningkatnya kemiskinan, baik di kota maupun desa, karena konsekuensi pelaksanaan kebijakan penyesuaian struktural sehingga terjadi peningkatan pengangguran, pengurangan subsidi pemerintah, serta kacaunya sistem jaminan sosial.
- b) Banyaknya konflik dan kekacauan publik di seluruh Indonesia selama masa transisi ke demokrasi sehingga kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat ini sangat diperlukan, karena ia merupakan lembaga yang memiliki akses ke kalangan bawah dan berkomitmen kepada kaum terpinggirkan.
- c) Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki segudang pengalaman dan pengetahuan, baik secara teori ataupun praktek yang lebih bagus dibanding aparat pemerintahan, sehingga pendidikan tidak hanya diterapkan terhadap masyarakat akan tetapi harus kepada para aparat birokrasi seperti banyak terlihat akhir-akhir ini.

Sementara itu, menurut Meuthia Ganie-Rochman (2006) dalam Widiyanto (2019:32-33) Lembaga Swadaya Masyarakat harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya, mulai diawali dengan orientasi, prosedur kerja, keahlian, pendekatan hingga jaringan sosial. Peningkatan kapasitas yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :

- a. Melalui penegasan ideologi dan orientasi. Dalam hal ini perlu dijelaskan dan divalidasi prinsip kerja yang akan diterapkan baik dalam organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dengan pihak luar yang berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas menyimpan, mengelola dan memanfaatkan data.
- c. Peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan berkoordinasi, dengan komunitas atau instansi yang berbeda. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui suatu organisasi atau komunitas lain agar dapat berkolaborasi, namun harus memiliki kemampuan untuk membentuk kerjasama.

- d. Kemampuan meningkatkan wawasan dan pengalaman, serta kemampuan melakukan evaluasi dan mendokumentasikan pengalaman untuk dikomunikasikan dan menjadi inspirasi untuk organisasi lain.
- e. Kemampuan meningkatkan akuntabilitas, yakni mengkomunikasikan pertanggungjawaban segala kegiatan kepada berbagai *stakeholders* yang berbeda.

Menurut Pradana (2021:73) fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengembangan masyarakat antara lain mengembangkan produksi lokal dan pasar lokal; membantu masyarakat untuk mengembangkan sumber daya sosial, modal, dan manusia; meningkatkan wawasan dan keterampilan; mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan, dan bertindak sebagai penghubung antara komunitas dan sistem. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut menjadi *output* dari *community development* karena berhasil menjadikan masyarakat yang berdaya sehingga dalam jangka panjang, diharapkan hasilnya berupa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mencapai kemandirian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat harus menggali potensi dirinya sendiri dan mencari metode secara inovatif untuk mengembangkan potensi yang ada sebagai sumber kekayaan untuk pengembangan masyarakat.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam proses pengembangan di masyarakat menurut Herdiansah (2016:62) yaitu sebagai berikut :

a. Fasilitator

Merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan pemberian dorongan untuk meraih kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi teladan, melakukan negosiasi dan sebagai mediator, memberikan dorongan, menciptakan kesepakatan bersama, serta melakukan manajemen dan pemanfaatan sumber daya.

b. Pendidik

Sebagai lembaga yang memberikan arahan sesuai wawasan dan pengalamannya serta bertukar pikiran dan pengalaman dengan masyarakat yang dibimbingnya. Menyadarkan masyarakat, memberikan informasi, menggugah keberanian, serta menyediakan pelatihan untuk masyarakat

merupakan kewajiban Lembaga Swadaya Masyarakat dengan posisi peran pendidik.

c. Perwakilan masyarakat

Peran ini diterapkan saat berinteraksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga demi kepentingan masyarakat yang didampinginnya. Sebagai pekerja sosial, harus mampu menganalisis sumber-sumber data yang akurat untuk melakukan pembelaan dengan menggunakan media untuk menjalin hubungan masyarakat, sehingga jaringan kerja berhasil didapatkan.

d. Peran-peran teknis

Mengacu pada pengimplementasian keterampilan yang bersifat praktek. Pendamping tidak hanya sekedar menjadi ‘agen perubahan’ yang mengatur kelompok, akan tetapi harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas secara teknis berdasarkan keterampilan dasar, seperti : melakukan identifikasi sosial, mengatur dinamika kelompok, menjalin hubungan, melakukan negosiasi, berkoordinasi, sebagai konsultan untuk memberi saran serta mencari dan mengelola sumber dana.

Di Indonesia, Arif (2020:32-34) berpendapat bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat mengalami perubahan dan peralihan fungsi, sesuai dengan kemajuan pembangunan. Paradigma yang terjadi pada saat ini ialah luasnya era globalisasi ekonomi. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat yang beroperasi dapat mendukung pembangunan desa melalui program berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui peran lembaga swadaya masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai advokator untuk menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat, sebagai agen penggerak partisipasi masyarakat, dan media pengontrol pembangunan desa terhadap masyarakat. Kemampuan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai agen perubahan yang dapat menginformasikan mengenai peran dan pelaku perubahan sebagai *community worker* dalam suatu proses penciptaan kondisi yang lebih baik dalam komunitas agar kesejahteraan sosial dapat dicapai terdapat tujuh peran yang dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemercepat, yakni memiliki empat fungsi dalam perubahan yaitu: membantu menyadarkan masyarakat agar keluar dari kondisinya, membangkitkan semangat dan menggerakkan kehidupan berorganisasi dalam masyarakat, menjalin interaksi sosial yang baik, serta mewadahi perencanaan yang efektif dan efisien.
- 2) Perantara, merupakan upaya menjembatani individu ataupun kelompok yang memerlukan pertolongan maupun pelayanan sosial tetapi masyarakat tersebut tidak mengetahui cara mendapatkan akses tersebut, dengan lembaga yang bersangkutan.
- 3) Pendidik, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Selain itu dapat memberikan masukan, saran, dan informasi penting guna kemajuan sasaran.
- 4) Perencanaan sosial, mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya, dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.
- 5) Advokat, peran yang aktif dan terarah, dimana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau pelayanan.
- 6) Aktivis, mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan.
- 7) Tenaga ahli, memiliki tugas sebagai pemberi informasi, saran dan masukan dalam berbagai aspek untuk kebutuhan masyarakat.

2.1.1.3 Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat

Salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah advokasi. Advokasi adalah usaha penegakkan secara sistematis yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi untuk memperjuangkan suatu isu agar diperhatikan untuk rencana kebijakan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai kegiatan menciptakan suatu basis pendukung terhadap kebijakan publik yang diambil agar dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mardikanto & Soebiato (2017:71) menyatakan bahwa pendekatan

advokasi menekankan pendampingan kelompok masyarakat untuk membantu membuka akses pembangunan, manajemen dan memobilisasi sumber daya agar dapat dikelola dan dikuasai. Masyarakat pada hakikatnya bersifat majemuk sehingga kekuasaan untuk mengakses sumber daya yang sama tidak merata. Dalam jangka panjang diharapkan masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Karena pendekatan advokasi ini merupakan salah satu bentuk penyadaran secara langsung tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembangunan.

Advokasi harus direncanakan dengan matang dan sistematis agar tujuan advokasi bisa menarik perhatian masyarakat maupun media masa yang diharapkan menjadi suatu dukungan. Melansir dari situs (Manis, 2024) Berikut ini langkah-langkah dasar melakukan advokasi, diantaranya yaitu:

a. Menentukan Isu Strategi Suatu Masalah

Suatu advokasi harus memiliki fokus masalah yang jelas. Misalnya masih banyak para lansia yang terlantar dan tidak terurus, maka diharapkan muncul program-program layanan sosial kepada penduduk lanjut usia agar hidupnya terjamin sehingga usia harapan hidupnya menjadi meningkat.

b. Mengumpulkan Data

Data menjadi hal penting karena sebagai bukti nyata. Data yang dikumpulkan harus membuktikan perbandingan berupa angka dari tahun ke tahun. Misalnya terdapat data dalam 1 tahun terakhir terdapat 6 penduduk lanjut usia yang meninggal karena kelaparan. Selain itu sertakan bukti bahwa tidak ada keluarga yang merawat semasa hidupnya.

c. Membentuk Aliansi dengan Organisasi Berkepentingan Sama

Dengan mengumpulkan orang-orang atau kelompok yang memiliki maksud yang sama sehingga membentuk sebuah aliansi yang merupakan salah satu cara untuk memperkuat elemen advokasi sehingga dengan jumlah massa yang banyak maka media/pers akan tertarik meliput untuk diinformasikan kepada khalayak ramai. Dengan kekuatan ini memberi peluang isu akan berhasil diperjuangkan.

d. Melemparkan Isu dan Kampanye Massa

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melempar isu ke masyarakat diantaranya membuat *press conference* di media massa dan menyebarkan selebaran berisi tuntutan advokasi.

e. Melakukan Lobi dan Pendekatan dengan Pengambilan Keputusan

Melobi merupakan salah satu cara memperjuangkan isu melalui kegiatan mempengaruhi pihak lain agar mengubah kebijakan yang direncanakan sesuai dengan tujuan isu yang di advokasikan.

f. Melakukan Komunikasi yang Baik dengan Media Massa

Kunci utama advokasi untuk memberikan informasi adalah media massa sehingga perlu menjaga komunikasi yang baik agar informasi tersampaikan.

g. Demonstrasi

Ini merupakan alternatif langkah terakhir advokasi jika sulit mengubah kebijakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan besarnya kekuatan massa maka media tidak akan segan meliput aksi dan secara tidak langsung akan membuat pengambil keputusan menjadi sedikit gentar.

h. Melakukan Evaluasi

Jika advokasi yang dilakukan gagal diperjuangkan maka diperlukan evaluasi untuk mencari strategi lain agar benar-benar berhasil mengubah kebijakan.

Terdapat aspek penting yang dapat diterapkan pada strategi pemberdayaan masyarakat, terutama melalui metode pelatihan dan advokasi kepada masyarakat miskin yaitu meliputi motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, pembangunan dan pengembangan jejaring. Peranan advokasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai analisis kebijakan yaitu melakukan reformasi sosial diwujudkan dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi respon pemerintah terhadap permasalahan yang ada, mengajukan opsi/pilihan dan memantau penerapan kebijakan. Dengan advokasi ini diharapkan masyarakat dapat hidup secara berdaya memiliki wawasan, kekuasaan, juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan agar kualitas hidupnya meningkat sehingganya tujuan pemberdayaan masyarakat berhasil digapai.

Dilansir dari laman lingkarlsm.com (2018) Pendekatan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat didasarkan pada persepsi mengenai keberadaan masyarakat miskin, yakni:

- 1) Pendekatan sosio-karitatif, yakni suatu pendekatan berdasarkan realitas fakta bahwa kondisi masyarakat itu lemah, miskin, tidak berdaya, penuh derita bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan dirinya sendiri. Dan pendekatan ini biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan saat kondisi mendesak. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat biasanya yang berlatar belakang keagamaan, menggunakan pendekatan ini melalui cara mendirikan yayasan untuk yatim piatu, panti jompo, membuat program sekolah gratis.
- 2) Pendekatan sosio-reformis. Pendekatan ini dilakukan melalui intervensi dalam permasalahan sosial dengan tujuan mengembalikan kondisi menjadi normal kembali. Bentuk kegiatannya antara lain seperti layanan kesehatan, memberikan solusi atas persoalan pribadi (misalnya ketergantungan pada narkoba, depresi), penanggulangan bencana alam, dan kelaparan.
- 3) Pendekatan sosio-ekonomis, yaitu suatu pendekatan yang mengungkapkan bahwa orang yang miskin tidak berdaya memiliki potensi untuk mengatasi masalah sosial-ekonominya sendiri. Sehingga dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut, masyarakat dapat mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai proses pemberdayaan.
- 4) Pendekatan sosio-transformis. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip perubahan. Mengupayakan perubahan perilaku, sikap, pola pikir dan kebiasaan masyarakat sehingga tujuan pembangunan masyarakat dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan berupa memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan merata dan partisipatif.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat tentu tidak dapat terlepas dari proses pemberdayaan, karena salah satu tujuan didirikannya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah melakukan pemberdayaan. Pada dasarnya, konsep

pemberdayaan diposisikan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Mulyana & Zainuddin (2017) dalam Masrul (2018) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang dikembangkan melalui praktek pekerja sosial yang bertujuan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang hadir dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip yang berbasis pada pembangunan yang berkesinambungan dan komprehensif. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan tangguh, program pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup, terutama bagi individu yang berada dalam kondisi rentan dan kurang mampu.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas pemberian bantuan, tetapi lebih pada suatu proses yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang berdampak pada kehidupan masyarakat (Subarsono, 2017:14). Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdikari dengan membangun kondisi yang mendukung pengembangan potensi.

Strategi pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam sikap kemandirian, efektivitas dan efesiensi yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan para sukarelawan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi penggerak masyarakat lainnya. Clarke (1991) dalam Hikmat (2017:86) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan kunci partisipasi yang sangat efektif untuk solusi kemiskinan karena kelompok *grassroot* memiliki peluang besar untuk mendapatkan hak-haknya, keadilan dan demokrasi yang didambakan. Partisipasi masyarakat memiliki kedudukan dalam urgensi pembangunan negara untuk kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhannya. Lalu Riyanto & Kovalenko (2023:376) juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat juga membantu memacu perluasan akses publik terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan

yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat.

Kemudian McArdle (1989) dalam Hikmat (2017:95) berpandangan bahwa hal paling penting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pola seperti ini diperlukan untuk mencapai tujuan pribadi diantara banyaknya pilihan di masyarakat, namun pada realitanya seluruhnya dilakukan oleh para “profesional” atas nama pemberdayaan. Karena hal inilah dapat menggagalkan fungsi dalam proses kontrol masyarakat untuk mengakses sumber daya justru malah menjadikan masyarakat tidak mampu berdaya.

Pemberdayaan bukan hanya mencakup penguatan individu pada anggota masyarakat, tetapi juga termasuk pranata-pranatanya meliputi penanaman nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggungjawab. Karena menurut Mardikanto & Soebiato (2017) pemberdayaan juga harus mencakup pada reaktualisasi institusi-institusi sosial dan mengonsolidasikannya ke dalam kegiatan pembagunan disertai peranan masyarakat di dalamnya. Urgensinya ialah meningkatkan partisipasi rakyat pada proses pengambilan keputusan terkait diri dan masyarakatnya. Maka hakikat pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pengoptimalan seseorang sebagai anggota kelompok tetapi juga harus meliputi penguatan sistem dan norma yang berlaku. Oleh karena itu upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

- a. Menciptakan kondisi iklim yang membuat potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*)

Menekankan pada prinsip bahwa setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Karena berdasarkan definisi pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu melalui dorongan untuk memberikan motivasi dan penyadaran akan potensi yang dimiliki.

- b. Penguatan potensi sumber daya milik masyarakat (*empowering*)

Penguatan ini terkait penyediaan berbagai masukan (*input*) juga kemudahan akses pada berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat membuat masyarakat

makin berdaya. Upaya primer yang dilakukan meliputi peningkatan taraf pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses pada sumber kemajuan ekonomi. Masukan pemberdayaan ini berupa pembangunan fasilitas dasar baik fisik maupun sosial yang dapat dijangkau oleh kaum bawah.

c. Memberdayakan sama dengan melindungi

Melindungi harus dilihat dari perspektif usaha menghindari terjadinya persaingan yang tidak proporsional serta mencegah pemanfaatan kelompok kuat pada kelompok lemah. Harus mengacu pada prinsip setiap apa yang dinikmati harus berasal dari kerja keras sendiri. Sehingga masyarakat mampu memanfaatkan kemampuannya untuk memajukan diri pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses partisipatif dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat untuk menganalisis problematika utama pembangunan serta mengajukan rancangan alternatif penyelesaian atas masalah tersebut. Dalam proses ini Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran sebagai fasilitator untuk melakukan pendampingan pada proses pemberdayaan masyarakat. Masih menurut Mardikanto & Soebianto (2017:120-122) berikut ini uraian mengenai pemberdayaan sebagai proses :

a. Pemberdayaan Sebagai Proses

Seiring dengan perkembangan zaman tentu banyak sekali perubahan yang terjadi baik itu perubahan kebutuhan primer, perubahan tradisi, perubahan kualitas berbagai aspek serta perubahan-perubahan lain yang terjadi di masyarakat oleh karena itu memerlukan inovasi pemberdayaan berupa ide, gagasan, metode, sarana prasarana yang dikembangkan melalui pengkajian.

Karena proses perubahan ini mewajibkan fasilitator berkompeten untuk berintegritas pada perbaikan mutu hidup masyarakat yang difasilitasi. Fasilitator dalam hal ini meliputi aparat pemerintah, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat maupun tokoh masyarakat. Sebagai *agent of change* fasilitator harus memberikan motivasi, menyediakan wadah dan melakukan advokasi demi merealisasikan perubahan yang di harapkan. Pemberdayaan harus mampu mengubah sikap para elit masyarakat agar memposisikan diri sebagai fasilitator

atau supervisor bukan sebagai penguasa sebagaimana realita di masyarakat saat ini. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran akademisi untuk menjalankan fungsi edukasi dan advokasi serta peran media sebagai fungsi komunikasi dan diseminasi inovasi.

b. Pemberdayaan Sebagai Proses Pembelajaran

Inti dari kegiatan pemberdayaan adalah tumbuhnya proses belajar mandiri agar melaksanakan perubahan secara berkelanjutan. Proses belajar disini dapat dimaknai sebagai proses menumbuhkan semangat belajar untuk saling bertukar pemikiran dan pengalaman yang berbasis pada kebutuhan masyarakat untuk memaksimalkan potensi dan memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan. Oleh karena itu fasilitator harus bisa menyetarakan diri sebagai teman berbagi bukan sebagai guru yang memberikan seluruh informasi tanpa ada timbal balik dari warga belajar.

c. Pemberdayaan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas ialah proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk memahami dan menjalankan pembangunan berkelanjutan. Kekuatan yang dimiliki masyarakat harus terus menerus dikembangkan supaya menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan daya jual yang lebih tinggi. Penguatan masyarakat memiliki makna timbal balik. Di satu sisi diarahkan agar individu lebih mampu mengambil kendali dalam kelompok masyarakat, di sisi lain untuk menilai peluang yang ada di masyarakat untuk kehidupan individu. Penguatan kapasitas meliputi: penguatan kapasitas individu, penguatan kapasitas entitas (kelembagaan), penguatan kapasitas sistem (jejaring). Keberhasilan proses ini diukur dari bagaimana pengakuan masyarakat itu sendiri atas keberhasilan usaha yang dilakukannya.

d. Pemberdayaan Sebagai Proses Perubahan Sosial

Pemberdayaan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (*social engineering*) yang bermakna segala usaha dilakukan untuk menyiapkan individu agar paham dan mampu menjalankan perannya berdasarkan fungsi pada sistem sosialnya masing-masing. Dalam proses ini juga terdapat istilah pemasaran sosial (*social marketing*) yakni penerapan konsep pemasaran dalam

proses perubahan sosial untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Makna “penawaran” ini berarti upaya menumbuhkan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sehingga pengambilan keputusan tersebut ada di tangan masyarakat itu sendiri.

e. Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan *sustainable development* karena pemberdayaan adalah gerbong yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Sehingga pembangunan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk mempercepat peningkatan dan pengembangan masyarakat melalui dukungan dan fasilitas agar bisa mengambil keputusan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya. Paradigma pembangunan harus didasarkan atas inisiatif dan kepentingan publik untuk terlibat aktif dalam seluruh proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dapat dibuktikan dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat agar berdaya mengelola pembangunan di wilayahnya secara berkesinambungan hingga terbebas dari kemiskinan.

f. Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai modal sosial (*social capital*) yang merupakan wujud dari kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap urgensi pembangunan untuk meningkatkan mutu hidupnya. Kegiatan yang menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan melalui forum agar masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk program pembangunan. Serta perlu adanya partisipasi masyarakat untuk merawat hasil-hasil pembangunan agar dapat dinikmati secara jangka panjang. Pemanfaatan hasil pembangunan dapat membangkitkan inisiatif warga untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama

pembangunan yang dihadapi dan pengajuan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu prinsip utama dalam suatu pemberdayaan masyarakat ialah ‘penyadaran’, menyadarkan masyarakat yang hendak diberdayakan agar bersedia bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik.

2.1.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi sebagai pola pikir dapat dipahami sebagai tindakan yang didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai kondisi eksternal dan internal dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini melibatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan solusi terbaik dengan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal, sekaligus menutupi kelemahan guna mengurangi ancaman. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi berperan sebagai proses dan alat penting dalam mengendalikan serta melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya sasaran. Dengan kata lain, strategi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perencanaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu Syakhirul Alim et al., (2022:59) menyatakan bahwa perencanaan program membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan.

Dalam kaitannya dengan program pemberdayaan masyarakat agar mencapai tujuan dirumuskan sebuah strategi sebagai berikut :

- a. Menyusun alat pengumpulan data. dalam program ini data yang dibutuhkan kan bisa berupa hasil riset yang telah dilakukan terdahulu, referensi yang tersedia, hasil-hasil temuan atau observasi.
- b. Menyamakan persepsi, dan komitmen untuk mendukung independensi individu, keluarga dan masyarakat.
- c. Merancang sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat

Pelaksanaan proses dan tujuan dapat dicapai dengan penerapan pendekatan pemberdayaan. Suharto (2005) dalam Damara, Nikmatullah, dan Nurmayasari (2015:316) menyatakan bahwa di dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras pemberdayaan (*empowerment setting*) meliputi :

a) Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap sasaran secara perseorangan melalui bimbingan, konsultasi, manajemen stress, dan intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah membimbing dan mendampingi sasaran dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan pribadinya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berfokus pada tugas (*task centered approach*).

b) Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sasaran yang berkelompok. Pemberdayaan diselenggarakan dengan menerapkan kelompok sebagai media intervensi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran biasanya berbentuk Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok. Dengan pemanfaatan wawasan, keterampilan dan perilaku kelompok diharapkan mampu mencari alternatif penyelesaian atas masalah yang dihadapinya.

c) Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system-strategy*), karena sasaran perubahan dipandu pada sistem lingkungan yang meluas. Strategi dalam pendekatan ini mencakup : perumusan kebijakan, aksi sosial, kampanye, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, melobi, pengelolaan konflik. *Large system-strategy* menilai sasaran sebagai individu yang kompeten untuk memahami kondisi dirinya sendiri, sehingga bisa menentukan cara yang cermat untuk melakukan tindakan.

Sementara itu Mardikanto & Soebiato (2017) mengemukakan pendekatan pemberdayaan memiliki acuan pada filosofi landasan dalam hakikat pemberdayaan, yaitu:

- a. Pendekatan partisipatif, yaitu memposisikan masyarakat sebagai fokus utama aktor dalam program pemberdayaan, yang meliputi:
 - 1) Pemberdayaan memiliki tujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat, bukan bertujuan untuk kepentingan penguasa;
 - 2) Pemilihan kegiatan, strategi dan metode pemberdayaan, serta penggunaan teknologi yang diberikan harus berdasarkan pada keputusan masyarakat;

- 3) Penilaian keberhasilan pemberdayaan, dalam hal ini penilaian harus berdasarkan parameter masyarakat yang menerima manfaatnya.
- b. Pendekatan kesejahteraan, Proses kegiatan yang diselenggarakan, sumberdaya dan teknologi yang dipakai, dan pihak yang berkontribusi, pemberdayaan masyarakat harus memiliki manfaat pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran.
- c. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, Pemberdayaan masyarakat tidak boleh membuat masyarakat menjadi bergantung, maka harus melahirkan masyarakat sasaran menjadi mandiri untuk melanjutkan program pemberdayaan sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan

Menurut Suharto (2005) dalam Maiti & Bidinger (2018:8-9) penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yakni sebagai berikut :

- a. Pemungkinan
Pemungkinan yakni membentuk kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang maksimal. Pemberdayaan harus mampu melepaskan masyarakat dari kemiskinan kultural dan struktur yang menghalangi.
- b. Penguatan
Penguatan yaitu mengoptimalkan wawasan dan kemampuan pada masyarakat dalam memecahkan masalah dan mencukupi segala kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menanamkan seluruh kemampuan dan membangun rasa percaya diri masyarakat demi menciptakan kemandirian.
- c. Perlindungan
Perlindungan berarti membela masyarakat khususnya kelompok rentan supaya tidak ditindas oleh kelompok elit juga mencegah terjadinya kompetisi yang tidak proporsional antara yang lemah dan kuat, dan menghindari penyalahgunaan manfaat kelompok kuat pada kelompok lemah. Pemberdayaan harus ditujukan untuk menganulir segala jenis ketidakadilan dan pengaruh yang tidak memberikan keuntungan pada rakyat.
- d. Penyokongan
Penyokongan yaitu memberikan dukungan pendampingan agar masyarakat bisa berperan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan

wajib menyokong masyarakat agar naik pada posisi yang lebih baik dalam kesejahteraan.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan yaitu merawat kondusifitas agar pengendalian kekuasaan antara berbagai kumpulan dalam masyarakat tetap harmonis. Pemberdayaan wajib memberikan jaminan keseimbangan dan keteraturan supaya setiap individu memiliki kesempatan untuk berusaha.

Pembangunan masyarakat juga bisa menggunakan dua metode yang saling bertolak belakang yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Kedua pendekatan ini bisa dipilih salah satu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan meninjau pendekatan mana yang paling tepat dan cocok agar dapat melaksanakan pembangunan yang dicanangkan. Berikut ini merupakan uraian mengenai bentuk pendekatan *top down* dan *up down* (Hasdiansyah, 2023:84) :

a. Pendekatan *Top Down*

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dihadirkan oleh aparat pemerintahan, atau lembaga pusat dalam mencanangkan dan menerapkan program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga proses perencanaan, pengambilan keputusan dan sumber daya berasal dari pusat untuk diselenggarakan pada tingkat yang lebih rendah. Ciri utama dari pendekatan *top down* ialah sebagai berikut :

- 1) Inisiasi dari pusat
- 2) Sentralisasi keputusan
- 3) Skala besar dan program-program kompleks
- 4) Pengawasan pusat
- 5) Partisipasi terbatas
- 6) Tantangan dalam keberlanjutan

Pendekatan *top down* dalam pemberdayaan masyarakat sering dipakai oleh pemerintah, organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta instansi-instansi besar lain yang dinilai sebagai efektivitas alat untuk mempercepat tujuan pembangunan. Namun kekurangan dari pendekatan ini ialah ketidakberdayaan masyarakat sekitar dan kurangnya penyesuaian dalam

memberikan jalan keluar atas problematika yang terjadi di masyarakat dan juga besar kemungkinan program yang dijalankan tidak ada keberlanjutan.

b. Pendekatan *bottom up*

Pendekatan ini memiliki ciri khas utama yaitu partisipasi aktif masyarakat karena menganggap rakyat sebagai subjek pembangunan. Individu dalam kelompok masyarakat berperan penting dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Masyarakat sangat dihargai dan diberi kesempatan agar mengidentifikasi tantangan dan memahami apa yang dibutuhkan sehingga membuat kehadiran masyarakat itu terasa dihargai dan memiliki tanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama-sama. Dalam hal ini pihak luar meliputi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi besar harus berperan sebagai mitra yang mendukung berjalannya proses pembangunan. Sehingga masyarakat memiliki peran sebagai kunci perubahan sosial untuk ekonomi yang berkesinambungan. Berikut ini ialah ciri-ciri dari pendekatan *bottom up* dalam pemberdayaan masyarakat :

- 1) Partisipasi aktif masyarakat
- 2) Pemahaman lokal
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
- 4) Pembangunan berkelanjutan
- 5) Pemberdayaan masyarakat
- 6) Kolaborasi dengan pihak luar

Upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat melahirkan kondisi yang global dan berkelanjutan.

2.1.3 Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Upaya memiliki persamaan kata dengan usaha atau ikhtiar untuk menggapai suatu tujuan atau keinginan, menyelesaikan masalah dengan mencari alternatif penyelesaian. Sehingga upaya dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan menggunakan strategi agar dapat

terwujud. Sebuah organisasi tentu selalu melakukan sebuah upaya untuk menggapai tujuan, salah satu organisasi di masyarakat yang melakukan berbagai upaya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Jim Ife (2016) dalam Maarif (2021) mengklasifikasikan 6 bentuk kekuatan masyarakat yang bisa dimanfaatkan dalam proses memberdayakan masyarakat. Keenam kekuatan itu adalah mampu memutuskan pilihan sendiri; mampu memahami kebutuhan hidupnya; mampu mengekspresikan diri; kemampuan kelembagaan; mampu mengakses sumber daya ekonomi; dan bebas dalam bereproduksi.

Dengan demikian pengembangan manusia merupakan proses fundamental bagi setiap individu karena memiliki beragam implikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan, peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peningkatan kesempatan untuk mencapai potensi terbaik individu (Herwina, 2023). Maka terdapat tiga strategi pemberdayaan yang dapat diterapkan. Ketiga strategi itu adalah:

- 1) Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang diselenggarakan dengan cara membangun atau mengubah struktur pada lembaga agar dapat memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan berpartisipasi dan pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat.
- 2) Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan perjuangan politik melalui berbagai gerakan untuk melahirkan kekuasaan yang efektif.
- 3) Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan untuk memberikan bekal wawasan dan keterampilan bagi masyarakat kalangan bawah untuk meningkatkan kekuatannya.

Oleh karena itu kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi sangat fundamental agar bersinergi dengan pemerintah. Karena saat melaksanakan proses pendampingan masyarakat tentu terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi sehingga memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak lain agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat

juga mengalami pergeseran fungsi dari sejak awal kemunculan LSM di Indonesia dengan keberadaannya di masa kini karena menyesuaikan paradigma pembangunan. Saat ini, era globalisasi ekonomi telah membuka ruang bagi proses produksi, perdagangan, dan pasar uang secara internasional. Oleh karena itu, bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh LSM dalam memberdayakan masyarakat meliputi (Eka, 2016) :

2.1.3.1 Pendampingan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan waktu, tahapan yang sistematis, serta aksi nyata yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pendampingan menjadi elemen yang sangat penting dalam setiap program pemberdayaan. Pendampingan ini bukan sekadar memberikan bantuan atau instruksi satu arah, melainkan lebih kepada peran sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam memahami potensi dirinya sendiri. Para pendamping bertindak sebagai komunikator yang menjembatani informasi serta kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain itu, juga berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan tanpa bersikap menggurui, sehingga masyarakat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan.

Dengan adanya pendekatan pendampingan yang tepat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pemberdayaan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan positif bagi lingkungannya. Hal ini akan memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan dan memastikan bahwa hasil yang dicapai dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pendampingan menurut Rahmawati & Kisworo (2017:96) merupakan suatu proses fasilitasi yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam menganalisis kebutuhan dan mencari solusi serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam mengambil keputusan, sehingga menjadikan masyarakat dapat mandiri dan berdaya. Lembaga Swadaya Masyarakat bertugas untuk mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan

media, menumbuhkan hubungan antar masyarakat, menjalin relasi kerja, serta membantu menyediakan layanan sosial.

Selanjutnya Sumodiningrat (2014) dalam Hendrawati (2018:52-53) memaparkan lima kegiatan penting yang dapat diimplementasikan dalam melaksanakan pendampingan sosial, yaitu:

- a. Memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin yang perlu diberikan dorongan dalam membentuk kelompok agar mempermudah dalam pengorganisasian, dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dapat meningkatkan pendapatan dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, sedangkan untuk masalah keterampilan dapat dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalamannya dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Sehingga komplementer inilah dapat membantu masyarakat miskin untuk menghasilkan sumber pendapatannya sendiri, melalui peningkatan keterampilan serta keahlian yang telah dilakukan.
- c. Manajemen diri. Setiap kelompok harus mempunyai pemimpin yang nantinya dapat memberi komando pada kegiatan yang akan dilakukan, misalnya melaksanakan rapat, atau membuat laporan dan notulensi. Pada langkah awal, pendamping membantu masyarakat untuk memulai pengembangan sistem. Lalu selanjutnya memberikan wewenang dan kebebasan kepada kelompok sasaran untuk mengelola dan menjalankan sistem tersebut.
- d. Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu, biasanya dilakukan masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh suatu pandangan, bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan,

pengalokasian, dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat, sehingga seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama, dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

- e. Pembangunan dan pengembangan jaringan. Manajemen kelompok swadaya masyarakat perlu dilengkapi dengan peningkatan kemampuan para anggotanya untuk menciptakan dan menjaga jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber daya dan kesempatan dalam peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dalam prakteknya Djohani, (2021:134) berpendapat bahwa di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan, pendampingan lebih banyak difokuskan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun demikian, aspek lain seperti penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal tetap menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang dilakukan. Sementara itu, LSM yang berperan sebagai oposisi cenderung mengarahkan pendampingannya pada kegiatan advokasi dan perjuangan masyarakat dalam menghadapi berbagai isu konflik. Isu-isu yang sering menjadi fokus advokasi meliputi penggusuran tanah, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pertambangan, dan permasalahan lingkungan. Pendampingan dalam konteks ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih kritis dan mampu melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan kepentingan rakyat, baik itu pemerintah, industri atau sektor swasta, maupun kekuatan lain yang dinilai sebagai ancaman bagi hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan pendampingan yang dilakukan oleh LSM dapat bervariasi tergantung pada visi, misi, dan peran yang dijalankan dalam masyarakat. Ada yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan, sementara yang lain lebih menekankan pada advokasi dan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Seharusnya organisasi masyarakat yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat bisa menjadi teladan organisasi dengan budaya kepemimpinan yang demokratis berkedaulatan rakyat sehingga dapat menginspirasi pihak lain (lembaga-lembaga

lokal lainnya). Sehingga dapat mendirikan pelopor lokal atau tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran kritis terhadap gerakan-gerakan yang tidak partisipatif dan dinilai otoriter di perkumpulannya. Kritis di sini bukan berarti ‘radikal’ dalam pengertian negatif melainkan bersikap inovatif dengan cara-cara yang membangun.

2.1.3.2 Penguatan Jaringan Sosial

Memberdayakan jaringan pranata sosial adalah upaya strategis dalam membangun dan mempertahankan peran serta fungsinya, sehingga dapat membantu menciptakan tatanan sosial yang lebih seimbang dan terstruktur. Dalam konteks ini, pranata sosial berperan sebagai wadah yang mengatur pola interaksi masyarakat, mendukung integrasi sosial, serta memperkuat kohesi di antara berbagai kelompok dalam komunitas. Agar upaya pemberdayaan ini berhasil, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan jaringan pranata sosial. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pranata sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta membangun mekanisme yang memungkinkan pranata sosial berfungsi secara efektif. Dengan demikian, pranata sosial dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan sosial masyarakat.

Tingginya kerjasama antar pranata sosial dapat memperkuat ketahanan sosial di masyarakat (Roebyantho & Padmiati, 2015:35). Jenis jaringan sosial dilansir dari laman dosensosiologi.com (2023) dalam kajian sosiologi, diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Jaringan Kepentingan, Jaringan ini terbentuk melalui hubungan-hubungan sosial yang memiliki kepentingan (b) Jaringan Kekuasaan, merupakan kemampuan seseorang sebagai unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan sebagai pengambil keputusan melalui pengendalian (c) Jaringan Sentimen, Jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang sentimen seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, dan lain sebagainya.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat melakukan pemberdayaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga swasta maupun instansi-instansi lain yang memiliki kepentingan yang sama berupa

pembangunan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam membangun jaringan sosial dan kerjasama menurut Arsyad (2015:15) sebagai berikut:

- a) Pendamping harus meyakini, mengakui dan menghargai bahwa setiap individu/lembaga memiliki potensi yang merupakan modal dasar dalam merealisasikan visi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Modal dasar tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutunya, serta dipadukan lewat proses dialog dan musyawarah dalam wadah jaringan.
- c) Musyawarah dan dialog adalah roh dari pendampingan desa.
- d) Pendamping desa memiliki keyakinan bahwa terdapat potensi jaringan sosial yang memiliki kepedulian terhadap problematika yang terjadi di masyarakat, memiliki urgensi dan berfungsi secara strategis, sehingga selalu menjadi pusat perhatian pendamping desa.
- e) Pendamping desa harus senantiasa menciptakan peluang dengan mengembangkan sistem dan mekanisme, agar potensi jaringan sosial yang terbentuk senantiasa terlibat dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kerjasama merupakan agenda penting dan strategis yang harus dipahami dengan baik oleh para fasilitator. Karena pemahaman terhadap jaringan sosial yang terbangun di pedesaan selama ini, sangat efektif untuk menjalankan kegiatan pendampingan yang dilakukan pada masyarakat desa. Diawali dengan proses perencanaan pembangunan hingga pada kegiatan pemberdayaan.

2.1.3.3 Advokasi Kebijakan Publik

Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional individu atau masyarakat secara demokratis dan adil. Coffman (2008) dalam Cahyaningrum (2021:47) menjabarkan kerangka strategi advokasi yang memperhatikan aspek hasil perubahan dan *audiens*. Dalam aspek hasil terdapat tiga prinsip yakni kesadaran, kehendak dan tindakan. Sementara pada aspek *audience*, terdapat tiga kategori aktor mencakup publik, pemengaruh dan pembuat kebijakan. Strategi yang dilakukan memerlukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Mobilisasi komunitas
- b) Pengorganisasian komunitas
- c) Pembangunan kapasitas advokasi dan kepemimpinan
- d) Pendidikan publik
- e) Umpan balik kebijakan
- f) Litigasi (penyelesaian perselisihan hukum)

Lembaga Swadaya Masyarakat juga sebagai lembaga yang independen harus mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah agar melakukan transparansi dan membuktikan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya masyarakat untuk tujuan pembangunan. LSM memiliki peran penting dalam melaksanakan advokasi. Upaya yang dapat dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui advokasi meliputi pendampingan hukum, pengorganisasian kelompok, edukasi kampanye publik, serta melakukan pelaporan dan pengontrolan pada pelaksanaan kebijakan pemerintah. Berikut ini strategi yang dapat dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai (Anugerah, 2023) :

Tabel 2.1 Strategi Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat

Tujuan	Strategi
Mendorong pemberian hak-hak yang setara tanpa diskriminasi	Advokasi langsung kepada instansi pemberi kebijakan atau ajukan gugatan ke pengadilan
Meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok yang menjadi sasaran advokasi	Memberikan bantuan hukum, edukasi, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, dan pengorganisasian kelompok
Membuat perubahan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kampanye publik, media sosial, pelobbyan, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait

(Sumber : Anugerah, 2023)

Berbagai upaya yang dilakukan dalam advokasi harus berprinsip pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, serta demokrasi. Jika tujuan advokasi tercapai maka akan menciptakan masyarakat yang setara, berkeadilan, dan kesejahteraan yang merata pada semua elemen masyarakat.

2.1.3.4 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen kunci dalam pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas individu. Satu hal yang miris menurut Kiromim (2015:23) adalah Jika melihat kenyataan bahwa banyak individu dari kelas ekonomi rendah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi, meskipun memiliki kemampuan dan prestasi yang baik, maka hal ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Pada dasarnya, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, karena merupakan bagian dari elemen bangsa yang berperan dalam membangun masa depan yang lebih maju. Dalam konteks ini, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting sebagai salah satu elemen masyarakat yang berkontribusi dalam proses penyadaran dan pemberdayaan.

LSM dapat berperan dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta fasilitasi berbagai program yang bertujuan untuk membuka akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Melalui berbagai cara seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, serta program bimbingan belajar, LSM dapat membantu menciptakan peluang bagi masyarakat agar tetap dapat mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik. Lalu Ragam (2024) menjabarkan pendidikan yang dilakukan bisa berupa penyuluhan tentang hak warga negara, politik, sosial dan kesehatan. Dengan pendidikan, individu dapat memiliki pemahaman lebih baik tentang hak-haknya serta bagaimana memperjuangkan kepentingannya sendiri. Musrianti (2025) mengungkapkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. LSM bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Menurutnya, dalam rangka pemerataan pendidikan LSM dapat melakukan beberapa program yaitu penyediaan fasilitas pendidikan dengan cara membantu membangun atau merenovasi fasilitas pendidikan di daerah terpencil terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Bisa berupa mendirikan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Sedangkan pelatihan menurut Herwina (2021) merupakan salah satu proses pembelajaran untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan menggunakan sistem pembelajaran yang berbeda dengan jangka waktu yang relatif pendek dengan mengutamakan pembelajaran secara praktek dibanding teori. Pelatihan meliputi kursus, dan program pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan

memiliki urgensi untuk menciptakan kemampuan teknis dan pengelolaan potensi masyarakat hingga pada akhirnya diharapkan dapat membuka peluang ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Contohnya program pelatihan keterampilan pada bidang tata boga atau pertanian sehingga menjadikan masyarakat pedesaan memiliki produktivitas untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pelatihan dalam suatu lembaga memainkan peran yang sangat penting serta berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup lembaga tersebut. Dari pelatihan apapun bentuk dan tingkatan yang ada, sejatinya akan mengarah pada perubahan sikap, baik secara individu maupun secara kelompok (Herwina, 2021). Dampak pada aspek sosial melalui proses pendidikan yang diberikan kepada kelompok swadaya yaitu dengan harapan terjadi peningkatan pemikiran dan pengetahuan sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berpikir dan berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelatihan yang efektif tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan motivasi untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pelatihan menjadi instrumen penting untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang pasif menjadi aktif dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, metode pelatihan yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan lokal sangat penting untuk diterapkan agar hasil yang dicapai dapat berkelanjutan dan memberi dampak jangka panjang.

Selain itu, pelatihan juga dapat memperkuat jaringan sosial dalam komunitas melalui interaksi antar peserta. Ketika masyarakat terlibat dalam pelatihan secara kelompok, mereka tidak hanya belajar dari fasilitator, tetapi juga saling bertukar pengalaman, ide, dan solusi. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan meningkatkan kerja sama antarwarga dalam menjalankan inisiatif pembangunan. Dalam jangka panjang, pelatihan dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih resilien dan berdaya.

Peningkatan pendidikan pada kelompok swadaya dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan peningkatan pendidikan secara langsung berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan lain-lain. Sedangkan, peningkatan pendidikan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan menyatunya individu dalam kumpulan swadaya. Melalui kelompok tersebut setiap anggota berkomunikasi untuk menciptakan kesadaran akan peran dirinya. Penyadaran diri adalah tahapan awal untuk memulai pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan mutu hidup. Selain itu dengan adanya kesadaran terhadap peran yang dipikulnya akan membuat kelompok swadaya mampu memperjuangkan hak-haknya dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki serta meretas kelemahannya (Kiromim, 2015:25).

2.1.3.5 Pemberdayaan Ekonomi

Pengertian pemberdayaan menurut Soetomo (2014) dilansir dari laman Pelajaran.co.id (2023) merupakan upaya untuk mengubah kondisi masyarakat dengan standar hidup sangat rendah agar bertransformasi ke kondisi yang lebih meningkat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik. Pemberdayaan ekonomi harus mampu melahirkan kesejahteraan yang menjadi idaman setiap individu dan setiap negara sehingga dapat disebut sebagai negara yang ideal dan optimal. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi harus didukung berbagai faktor diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, permodalan, prasarana produksi dan pemasaran. Sedangkan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Hutomo dalam Rahayu (2016) meliputi :

- a. Pemberian bantuan modal, usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan dilakukan dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menyebabkan ketergantungan masyarakat. Klasifikasi dalam aspek modal ini diselenggarakan melalui sistem yang kondusif untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah agar memiliki akses dan kesempatan di lembaga keuangan.
- b. Bantuan pembangunan prasarana, Tersedianya prasarana pemasaran dan transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai distribusi yang nantinya mampu meningkatkan pemasukan petani dan pengusaha mikro,

kecil dan menengah. Maknanya pemberdayaan ekonomi melalui proyek pembangunan prasarana memang strategis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Bantuan pendampingan, Tugas utama pendampingan adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan dalam proses memandirikan masyarakat bidang ekonomi.
- d. Penguatan kelembagaan, Pendekatan pemberdayaan ekonomi biasanya lebih efektif dilakukan melalui pendekatan kelompok sehingga akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.
- e. Penguatan kemitraan usaha

Dengan keterkaitan produksi yang adil, maka akan terbangun efisiensi dalam roda perekonomian masyarakat. Oleh karena itu melalui kemitraan baik itu dalam bidang permodalan, dalam proses produksi, dalam distribusi maka masing-masing pihak akan diberdayakan

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat biasanya berbasis komunitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Hal yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan pemberdayaan dalam hal perorganisasian serta melakukan pendampingan terkait manajemen dan peningkatan kualitas dan pemasaran. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat disini sesuai pada *business development service* dalam kategori pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen (Astuti, 2019:18).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka mendukung penelitian mengenai Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat SAPERAK Pemberdayaan Masyarakat, maka peneliti memerlukan hasil penelitian yang relevan, yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang relevan yang peneliti temukan diantaranya :

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Arif (2020) menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu berperan dengan baik demi berfungsinya struktur kemasyarakatan secara menyeluruh agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat *Blood For Life*

Foundation (BFLF) berperan untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dan kepedulian masyarakat untuk menyediakan rumah singgah bagi pasien rawat jalan yang berasal dari luar kota dengan tujuan program kemanusiaan. Sebagai lembaga yang menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kepentingannya.

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Herdiansah (2016) menjelaskan bahwa Ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat tidak hanya berperan sebagai jembatan kekuatan rakyat dengan negara, tetapi harus turut serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam proyek pembangunan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka Lembaga Swadaya Masyarakat harus memiliki integritas yang tinggi, berdaulat, profesional, kompeten serta memiliki koneksi organisasi yang luas. Eksistensi dan kredibilitas Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dipertahankan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya anggota untuk menjaga efektivitas organisasi agar tetap eksis dan peka terhadap berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat.

Dalam penelitian Hardianto & Martono (2023) ini mengungkapkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran sebagai *capacity builder* untuk membantu masyarakat mencapai tingkat keberdayaan. Masyarakat harus mampu menggali potensi dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendorong masyarakat agar dapat mandiri. Karena hasil akhir dari *community development* adalah berdirinya masyarakat tanpa terikat dari pihak luar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan keberdayaan ini individu dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu program dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya keuangan mikro, meningkatkan kapasitas dan memandirikan masyarakat untuk berdaya sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Hasil penelitian Widiyanto (2019) menguraikan bahwa pada konsep *civil society* kondisi masyarakat jauh dari kata kemandirian sehingga perlu adanya organisasi sosial yang independen dengan tingkat kemandirian yang tinggi salah satunya ialah Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena memiliki ciri khas bersifat

sukarela dan tidak menggantungkan diri pada pemerintah, maka Lembaga Swadaya Masyarakat sangat berperan penting dalam *civil society* untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dari akar rumput. Dalam konteks hubungannya dengan pemerintah terdapat 2 pola hubungan yakni yang pertama bersifat *collaboration/cooperation* yaitu bersinergi untuk hubungan yang saling memberi untung. Yang kedua adalah hubungan yang bersifat *containment/dissolution* pemerintah menganggap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai ancaman sehingga menghalangi pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik.

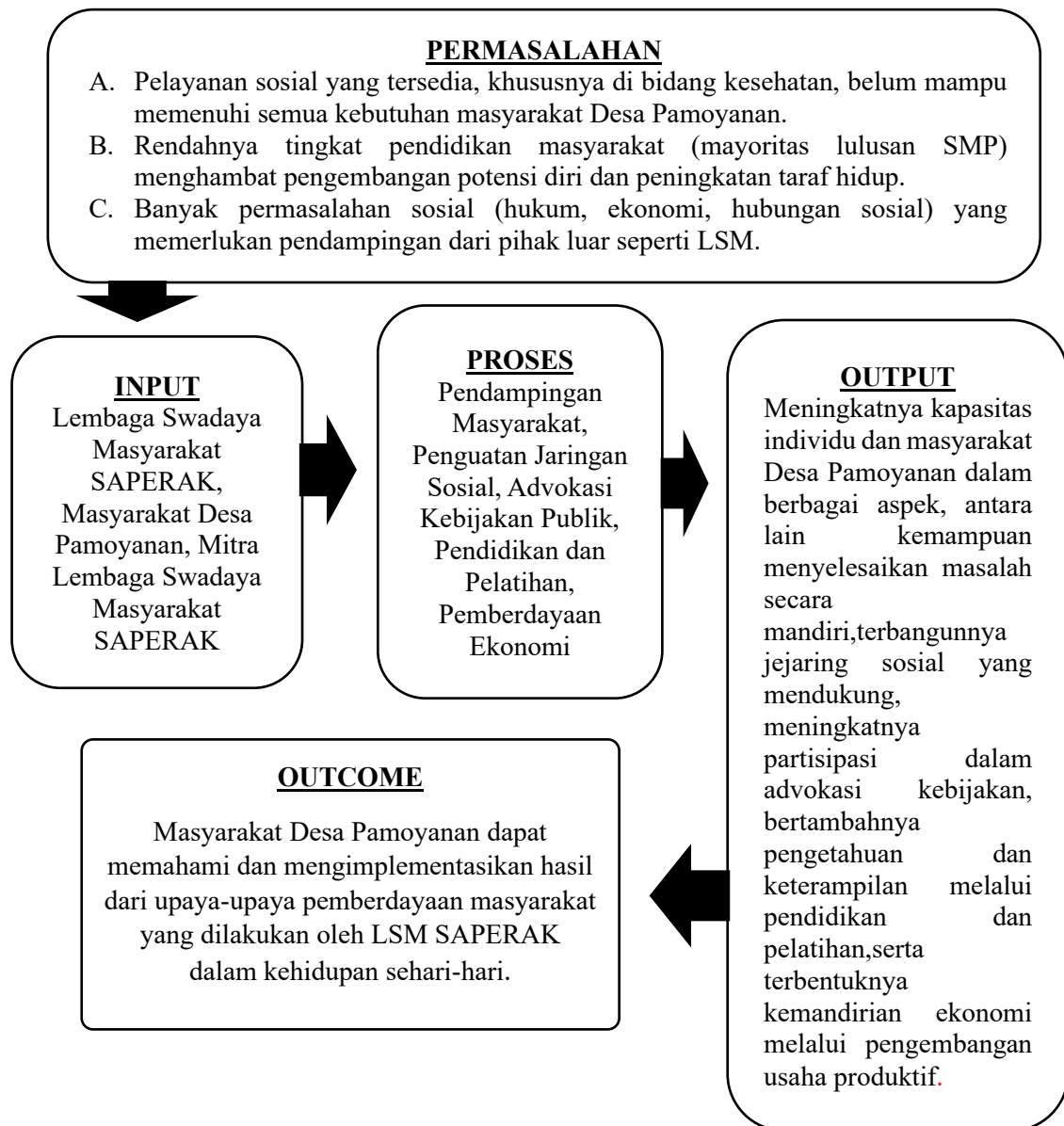
Lalu dalam penelitian Riva et al., (2018) menjabarkan pengembangan institusi lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kondisi sumberdaya, ekonomi, sosial dan politik lokal maupun nasional. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dalam pembangunan daerah yaitu mengembangkan kapasitas dan kelembagaan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, peningkatan kapabilitas pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, pengembangan advokasi pada pemerintah daerah, perluasan sektor usaha masyarakat yang didampingi oleh instansi swasta. Asumsi dalam pelaksanaan program ini adalah munculnya kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat secara adil dan lestari agar tidak menimbulkan gejolak sosial politik yang menghambat efektivitas program. Verifikasi yang dapat dilakukan berupa meningkatnya kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjaganya kelestarian sumberdaya hutan, lahirnya sinergitas antara masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas mengenai Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Saperak Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Input adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, maka input pada penelitian ini mencakup sumber daya manusia yaitu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat SAPERAK, Masyarakat Desa Pamoyanan, dan pihak eksternal yang

bermitra dengan Lembaga Swadaya Masyarakat; Sumber daya finansial yang didapatkan dari sumbangan masyarakat, kas anggota maupun dari donatur; Fasilitas dan sarana prasarana untuk menunjang program pemberdayaan; Proses adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SAPERAK berupa Pendampingan Masyarakat, Penguatan Jaringan Sosial, Advokasi Kebijakan Publik, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberdayaan Ekonomi.

Output dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPERAK di Desa Pamoyanan merupakan hasil nyata dari berbagai kegiatan yang telah diimplementasikan. Melalui kegiatan pendampingan masyarakat, tercipta peningkatan kemampuan warga dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri serta tumbuhnya rasa percaya diri dan keberdayaan dalam menghadapi tantangan sosial di lingkungan masyarakat Desa Pamoyanan. Kegiatan penguatan jaringan sosial menghasilkan terbentuknya kolaborasi antara masyarakat dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, yang memperluas akses terhadap informasi, sumber daya, dan dukungan. Dalam hal advokasi kebijakan publik, output yang dicapai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan hak dan kepentingannya, serta munculnya respons atau perubahan kebijakan dari pihak berwenang yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan pelayanan sosial. Selanjutnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan memberikan dampak berupa meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, hukum, dan kewirausahaan, yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dari kegiatan pemberdayaan ekonomi, output yang dihasilkan meliputi terbentuknya kelompok-kelompok usaha masyarakat, meningkatnya pendapatan rumah tangga, serta munculnya kemandirian ekonomi di kalangan warga melalui kegiatan ekonomi produktif. Lalu outcome dari proses ini masyarakat Desa Pamoyanan dapat memahami dan mengimplementasikan hasil dari upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SAPERAK dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

(Sumber : Data Peneliti, 2025)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana upaya Lembaga Swadaya Masyarakat SAPERAK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya?"